

EKSISTENSI PENDIDIKAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI BERDEMOKRASI

Gisela Agustin¹, Nadya², Siti Tiara Maulia³

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Jambi
Alamat e-mail : giselaagustin237@gmail.com, n3906417@gmail.com,
sititiaramaulia@unja.ac.id

Abstract

Community participation is the main key to running government activities, without community participation a country cannot be called a democracy. The problem that often occurs is low community participation. The aim of writing this article is to analyze the causes of low community participation and efforts that can be made to increase community participation. The writing in this article uses a literature study method which examines theory through references in the form of books, notes, results of previous research as well as collecting relevant literature and documents. Thus, the low level of community participation is caused by a lack of public awareness about the political rights they have. Therefore, efforts that can be made are to provide political education that can increase understanding of democratic principles, rights and obligations as citizens, take part in discussions on political issues and criticize policies made by the government. Having good political education can increase people's active participation in the democratic process.

Keywords : Participation, Democracy, Political Education

Abstrak

Partisipasi masyarakat merupakan kunci utama berjalannya kegiatan pemerintahan, tanpa adanya partisipasi masyarakat suatu negara tidak bisa disebut sebagai demokrasi. Permasalahan yang sering terjadi adalah rendahnya partisipasi masyarakat. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Penulisan dalam artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan yang mengkaji teori melalui referensi-referensi berupa buku, catatan, hasil penelitian terdahulu serta mengumpulkan literatur dan dokumen-dokumen yang relevan. Dengan demikian, rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak berpolitik yang dimiliki. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pendidikan politik yang dapat meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, mengambil bagian dalam diskusi mengenai isu-isu politik serta mengkritik kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan memiliki pendidikan politik yang baik dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.

Kata kunci : Partisipasi, Demokrasi, Pendidikan Politik

Pendahuluan

Demokrasi adalah sebuah sistem politik di mana setiap warga negara memiliki hak setara untuk membuat keputusan. Demokrasi memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum baik secara langsung maupun melalui perwakilan (Khoiri & Irwan, 2020). Negara demokrasi bergantung pada partisipasi warga negara. Tidak hanya partisipasi yang ditunjukkan

dengan memberikan suara mereka dalam pemilihan umum, masyarakat juga menunjukkan partisipasi dalam bentuk yang lebih luas, seperti berpartisipasi dalam diskusi tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan memiliki kendali atas pelaksanaan kebijakan dan program.

Permasalahan politik Indonesia sering kali terjadi dan berubah-ubah. Setelah reformasi, partisipasi warga negara dalam politik menunjukkan tanda-tanda penurunan. Ini ditunjukkan oleh penurunan kualitas dan jumlah partisipasi politik. Berbagai pihak pemerintah, penyelenggara pemilu, dan organisasi nonpemerintah terus memperbaiki tingkat partisipasi politik yang rendah ini. Beragam faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik diantaranya adalah kepercayaan publik yang rendah terhadap partai politik atau kandidat yang bersaing dalam pemilihan, penguatan politik "imbal jasa" yang mendorong pemilih untuk memilih dengan memberikan uang, tingkat pengetahuan warga yang rendah tentang hak berpolitik, banyaknya media partisan, dan peningkatan pembelahan politik.

Oleh karena itu, pendidikan politik adalah salah satu upaya yang dilakukan. Pendidikan merupakan bagian penting dari pembentukan kepribadian seseorang dan merupakan proses yang terus menerus. Selain itu, pendidikan dimaksudkan untuk mempersiapkan individu untuk memahami, memecahkan masalah, membuat keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pendidikan politik, atau pembentukan politik, adalah upaya untuk melibatkan warga negara dalam membangun budaya partisipasi. Di mana pendidikan politik sangat penting untuk meningkatkan partisipasi berdemokrasi. Pendidikan politik membantu orang lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dan bagaimana sistem politik dan pemerintahan bekerja. Dengan demikian, pendidikan politik dapat membantu orang lebih terlibat dalam proses demokrasi, sehingga mereka menjadi lebih sadar akan hak dan tanggung jawab politik mereka sebagai warga negara.

Metode

Penyusunan dalam artikel ini menggunakan studi kepustakaan (library research). Sugiyono (2018: 291) menyatakan bahwa studi kepustakaan (library research) berkaitan dengan kajian secara teori melalui referensi-referensi berupa buku, catatan maupun laporan hasil dari penelitian terdahulu. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan literatur yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan beserta dokumen-dokumen yang relevan. Secara sederhana, studi kepustakaan membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan dari perpustakaan tanpa harus turun langsung ke lapangan untuk mencari data yang diperlukan (Zed. 2014).

Pembahasan

Manusia tidak bisa lepas dari pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan di setiap negara. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar seseorang secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat. Menurut

Sugiarto, dkk (2013:3) pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mengubuh tingkah laku manusia baik secara individu maupun kelompok untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Pendidikan bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai kepada orang-orang agar mereka dapat berkembang secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan mereka, seperti intelektual, sosial, emosional, dan spiritual. Tujuan lain dari pendidikan adalah untuk membantu orang-orang mencapai potensi terbaik mereka, berkontribusi positif kepada masyarakat, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Selain itu, pendidikan juga bertujuan untuk membangun karakter, menanamkan nilai, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam kehidupan manusia. Ini bukan hanya proses memberikan pengetahuan; itu juga penting untuk perkembangan individu, masyarakat, dan bahkan dunia secara keseluruhan.

Seperti halnya dengan pendidikan politik, pendidikan politik merupakan faktor penting bagi terbentuknya sikap politik warganegara yang mendukung berfungsinya sistem pemerintahan secara sehat. Pendidikan politik adalah usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak di bangun (Alfian dalam jurnal Sunarso). pendidikan politik juga diartikan sebagai suatu proses penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan secara sengaja, terencana, bisa bersifat formal maupun informal, dilakukan secara terus menerus dari generasi ke generasi, agar warganegara mau berpartisipasi dalam politik, serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab.

Hakikat pendidikan politik adalah untuk mempersiapkan individu menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pendidikan politik memberikan pengetahuan tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan mekanisme pemerintahan demokratis. Pendidikan politik juga memberikan kesempatan kepada individu untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan orang lain serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara. Melalui pendidikan politik ini juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem politik, proses politik, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya partisipasi dalam kehidupan politik. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, kritis, dan aktif dalam berpartisipasi di kehidupan politik negara.

Indonesia yang merupakan negara yang menerapkan sistem demokrasi. demokrasi sendiri dipilih dan disepakati oleh para ahli untuk merujuk pada adanya kesetaraan hak warga negara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka (Latuconsina, 2013). Latif (2016) menyatakan bahwa dalam imaji berbangsa dan bernegara, demokrasi identik dengan kebajikan dan ketenteraman masyarakat di masa depan. Demokrasi menjadi proses untuk dukungan terhadap kesetaraan warga negara, menolak kediktatoran, mendukung kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk melakukan pemogokan.

Pemerintahan yang demokratis memiliki beberapa karakteristik umum, yaitu, (1) adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik baik langsung maupun perwakilan; (2) adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak warga negara; (3) adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara; serta (4) adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil untuk menentukan

pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat (Cholisin, 2007; Latuconsina, 2013; Latif, 2016; Magnis-Suseno, 2016). Demokrasi sejatinya mengatur hak warga negara untuk terlibat dalam semua proses politik dan kebijakan. Hak-hak politik warga negara tidak hanya dibatasi dalam kerangka dapat dipilih dan memilih saja. Namun lebih jauh dari pada itu, bagaimana warga negara terlibat dalam proses pengambilan keputusan baik sebelum maupun setelah pemilihan berlangsung (Bawamenewi, 2019).

Dalam perkembangan demokratisasi di Indonesia, masih banyak warga negara yang belum mengetahui secara menyeluruh terkait hak-hak politik mereka. Hal ini disebabkan oleh batasan hak politik hanya berfokus pada kesediaan masyarakat untuk memberikan suaranya saat pemilu berlangsung. Kesadaran pragmatis masyarakat ini terkadang sering dimanfaatkan oleh elite politik untuk mendulang suara. Praktik politik transaksional sering terjadi dalam situasi dimana kesadaran masyarakat terhadap hak politiknya rendah atau disebut juga dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam partisipasi berdemokrasi. Menurunnya kualitas serta kuantitas partisipasi politik masyarakat ini tentunya dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman tentang isu-isu politik dan kejenuhan terhadap proses demokrasi yang tidak juga memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas hidup warga negaranya. Masyarakat masih beranggapan bahwa sistem politik bukanlah urusan mereka, melainkan urusan pemerintah. Para aktor terpilih dianggap tidak benar-benar memperjuangkan nasib rakyat, namun justru memperkaya diri sendiri dengan menggunakan kekuasaannya. Hingga akhirnya, akumulasi kekecewaan terhadap realitas politik yang dirasakan kemudian mendorong terbentuknya sikap apatis politik (Yanuarti, 2016; Husna, 2019).

Demokrasi mendasarkan pada prinsip persamaan, yaitu setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan di dalam pemerintahan. Karena pada dasarnya kedaulatan negara berada ditangan rakyat. Setiap warga negara sejatinya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah melalui kesepakatan dan aturan untuk kepentingan bersama demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Kekuasaan rakyat inilah yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara. Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan dalam pemerintahan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam demokrasi sehingga kekuasaan dalam negara dapat berjalan sesuai dengan kepentingan rakyat.

Partisipasi berdemokrasi merujuk pada kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi berdemokrasi ini mencakup berbagai aspek seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya. Partisipasi berdemokrasi dianggap sebagai hak bagi setiap warga negara di negara demokrasi dan sangat penting bagi jalannya demokrasi.

Partisipasi ini juga merupakan hak setiap warga negara dan dianggap sebagai bagian yang penting dari demokrasi. Partisipasi berdemokrasi dapat membantu individu dan kelompok mempengaruhi kebijakan pemerintah dan proses keputusan politik, serta membantu mereka mengeluarkan suara dan menyampaikan pendapat mereka kepada pemerintah. Partisipasi berdemokrasi juga dapat membantu

menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif, karena individu dan kelompok yang terlibat dalam proses keputusan politik dapat memastikan bahwa suara mereka didengar dan diakui. Melalui partisipasi juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, karena individu dan kelompok yang terlibat dapat memastikan bahwa pemerintah bertindak secara terbuka dan jujur.

Upaya peningkatan kesadaran warga terhadap hak politiknya perlu dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan karena hal ini mempengaruhi kematangan demokrasi di Indonesia. Hak-hak politik ini juga terkait dengan bagaimana masyarakat mendapatkan informasi yang memadai dan sehat (Thurston, 2015; Voorhoof, 2015), bagaimana perlindungan terhadap kehidupan dan perekonomiannya sebagai hasil dari proses politik (Maftuchan et al, 2016). Oleh sebab itu, melalui Pendidikan politik ini dapat membantu warga negara memahami pentingnya demokrasi dan hak asasi manusia, serta cara menghargai dan menghormati hak-hak orang lain. Melalui Pendidikan politik ini juga dapat membantu warga negara menjadi lebih aktif dan tanggap terhadap isu-isu yang terjadi di sekitar mereka, serta membantu mereka mengembangkan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai keadilan sosial. Secara keseluruhan, pendidikan politik dapat membantu warga negara meningkatkan partisipasinya, membantu mereka memahami cara kerja pemerintahan dan sistem politik di negara mereka, serta cara mengambil bagian dalam proses keputusan politik secara aktif dan efektif.

Kesimpulan

Di Indonesia permasalahan politik masih mengalami pasang surut, salah satunya rendahnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah serta tingkat pengetahuan yang masih rendah mengenai hak berpolitik. Namun, partisipasi masyarakat sangat penting dalam negara demokrasi, tidak hanya dengan memberikan suara dalam pemilihan umum, tetapi juga dalam bentuk lain seperti berdiskusi mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan memiliki kendali terhadap pelaksanaan program pemerintah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar mereka mampu meningkatkan partisipasinya dalam politik. Melalui pendidikan politik, masyarakat akan memahami prinsip-prinsip dasar demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya pendidikan politik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik, termasuk mengambil bagian dalam diskusi politik, dan mengkritik kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu, pendidikan politik juga dapat membantu masyarakat memahami cara kerja pemerintahan dan sistem politik yang berlaku di negara mereka sehingga mereka dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara aktif dan efektif. Melalui partisipasi, masyarakat dapat memastikan bahwa pemerintah bertindak secara terbuka dan jujur, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dengan demikian, pendidikan politik menjadi landasan penting dalam membentuk masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.

Saran

Diharapkan dengan adanya penjelasan mengenai pentingnya partisipasi

masyarakat dalam proses demokrasi, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif dan bersama-sama dalam proses demokrasi. Selain itu, juga diperlukan responsivitas pemerintah dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat, termasuk menerima dengan terbuka kritik dan saran yang membangun terkait kebijakan yang diambil serta pembentukan kebijakan publik yang menguntungkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, harapannya adalah tercipta kerjasama kolektif antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kehidupan bernegara yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Affandi, F. N. (2019). pelaksanaan Pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Husna, A., & Fahrimal, Y. (2021). Pendidikan politik: Upaya peningkatan partisipasi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, 3(1), 85-100.
- Kharisma, D. (2015). Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 1(7), 1144.
- Kusmanto, H. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Demokasi Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(1), 78-90.
- Lengkoan, I. C. J., Liando, D. M., & Kumayas, N. (2022). Efektivitas Program Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kota Bitung. *Governance*, 2(1).
- Mashuri, M. (2014). Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pembangunan Demokrasi. *Menara Riau*, 13(2), 178-186.
- Millah, N. S., & Dewi, D. A. (2021). Skpp Bawaslu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 355-363.
- Nadir, N., & Wardani, W. Y. (2019). Membangun Pendidikan Politik Dalam Fatsun Demokrasi Pancasila Dan Deliberative. *The Journal of Society and Media*, 3(1), 126-141.
- Pahlevi, M. E. T., & Amrurobbi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 6(1), 141-152.
- Utaminingsih, S., & Rachmawaty, S. (2023). Pentingnya Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Warganegara di Desa Kuripan Ciseeng Bogor. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 181-193.